



## Analisis Hukum dalam Upaya Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Era Digitalisasi di Bandar Lampung

Sutan Saladin<sup>1\*</sup>, Juandi<sup>2</sup>, Zainudin Hasan<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Indonesia

Email: [sutan.22211095@student.ubl.ac.id](mailto:sutan.22211095@student.ubl.ac.id)<sup>1\*</sup>, [juandi.222110902@student.ubl.ac.id](mailto:juandi.222110902@student.ubl.ac.id)<sup>2</sup>,  
[zainudinhasan@ubl.ac.id](mailto:zainudinhasan@ubl.ac.id)<sup>3</sup>

Korespondensi email: [sutan.22211095@student.ubl.ac.id](mailto:sutan.22211095@student.ubl.ac.id)

**ABSTRACT.** *This study aims to analyze efforts to prevent and eradicate corruption in the context of digitalization in Bandar Lampung. The digitalization era brings significant changes in the way government and society interact, which has the potential to create opportunities for corrupt practices. The research method used is a qualitative approach with data analysis from interviews, documentation studies, and observations. The results of the study indicate that although there have been preventive measures through the application of information technology, there are still loopholes that can be exploited by perpetrators of corruption. The main causal factors include the lack of legal awareness among the community, as well as minimal supervision and transparency in the use of the budget. This study recommends the need for increased training for law enforcement officers, as well as the implementation of a stricter and more transparent supervision system in the use of digital technology. Thus, this study is expected to provide valuable insights for policy makers in formulating more effective strategies to prevent and eradicate corruption, as well as increasing legal awareness among the Bandar Lampung community in this digital era.*

**Keywords:** *Legal Analysis, Eradication, Corruption, Digitalization*

**ABSTRAK.** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam konteks digitalisasi di Bandar Lampung. Era digitalisasi membawa perubahan signifikan dalam cara pemerintahan dan masyarakat berinteraksi, yang berpotensi menciptakan peluang bagi praktik korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis data dari wawancara, studi dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah ada langkah-langkah pencegahan melalui penerapan teknologi informasi, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Faktor penyebab utama meliputi kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, serta minimnya pengawasan dan transparansi dalam penggunaan anggaran. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat dan transparan dalam penggunaan teknologi digital. Dengan demikian, studi ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berharga bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas korupsi, serta meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Bandar Lampung di era digital ini.

**Kata Kunci :** Analisis Hukum, Pemberantasan, Korupsi, Digitalisasi

### 1. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah serius yang mengganggu stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga berdampak negatif pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah. Dalam konteks ini, Bandar Lampung, sebagai salah satu kota besar dan ibu kota Provinsi Lampung, menghadapi tantangan signifikan terkait praktik korupsi yang merugikan masyarakat. Data menunjukkan bahwa selama periode 2018 hingga 2023, Bandar Lampung mengalami meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik. Salah satu kasus paling mencolok terjadi pada tahun 2021, di mana mantan kepala Dinas

Pekerjaan Umum ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terlibat dalam korupsi anggaran proyek infrastruktur. Kasus ini mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 10 miliar. Selain itu, kasus korupsi di Dinas Pendidikan yang melibatkan pengadaan buku dan alat tulis juga mengemuka, di mana ditemukan adanya praktik mark-up harga yang merugikan anggaran daerah. (Aritonang, 2020, hlm. 20-50)

Era digitalisasi, yang ditandai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, membawa dampak signifikan terhadap cara pemerintahan beroperasi. Digitalisasi menawarkan peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun juga menciptakan ruang bagi praktik korupsi yang lebih kompleks. Dengan adanya sistem informasi yang canggih, pelaku korupsi dapat memanfaatkan teknologi untuk menyembunyikan jejak transaksi ilegal. Misalnya, penggunaan aplikasi dan sistem manajemen data dapat dimanfaatkan untuk memanipulasi informasi dalam pengelolaan anggaran. Korupsi di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung, telah menjadi masalah struktural yang sulit diatasi. Data menunjukkan bahwa tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi, dengan berbagai kasus yang melibatkan pejabat publik dari berbagai tingkatan. Menurut laporan KPK, sepanjang tahun 2021, terdapat lebih dari 500 kasus korupsi yang ditangani, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah. Salah satu contoh kasus yang menonjol di Bandar Lampung adalah kasus korupsi yang melibatkan mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum, yang terlibat dalam penggelapan anggaran proyek infrastruktur. Kasus ini tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. (Lestari, 2020, hlm. 45-58)

Digitalisasi telah mengubah cara pemerintah dan masyarakat berinteraksi. Dengan adanya teknologi informasi, proses administrasi dan pengelolaan anggaran menjadi lebih efisien. Namun, kemudahan akses terhadap informasi dan data juga memberikan peluang baru bagi pelaku korupsi untuk melakukan praktik ilegal. Misalnya, penggunaan aplikasi dan sistem manajemen data sering kali disalahgunakan untuk memanipulasi informasi, menciptakan laporan yang tidak akurat, atau menyembunyikan transaksi mencurigakan. Di Bandar Lampung, meskipun terdapat inisiatif untuk menerapkan sistem digital dalam pengelolaan anggaran, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya pengawasan yang efektif terhadap penggunaan teknologi tersebut. Selain itu, banyak pejabat publik yang belum sepenuhnya memahami potensi dan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi dalam pengelolaan anggaran. (Rahman Ahmad, 2021, hlm. 105)

Tantangan lain yang dihadapi adalah rendahnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat mengenai pentingnya pengawasan terhadap pengelolaan anggaran publik. Banyak masyarakat yang tidak memiliki akses atau pemahaman yang cukup tentang bagaimana melaporkan praktik korupsi, sehingga memungkinkan pelanggaran hukum berlangsung tanpa terdeteksi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada tindakan penegakan hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dalam konteks digitalisasi. Dengan mengidentifikasi strategi yang telah diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta peran teknologi dalam pencegahan korupsi, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pengembangan kebijakan yang lebih efektif. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah di era digital ini.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini dirancang untuk menganalisis dan mengevaluasi upaya pencegahan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung, terutama dalam konteks digitalisasi. Metode ini mencakup pendekatan kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif mengenai isu ini.

## **3. PEMBAHASAN**

### **Konteks Korupsi di Bandar Lampung**

Korupsi telah menjadi masalah yang meresahkan di Indonesia, termasuk di Bandar Lampung. Sebagai ibu kota Provinsi Lampung, Bandar Lampung memiliki peran penting dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Namun, berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik menunjukkan bahwa sistem pengawasan dan akuntabilitas masih lemah. Menurut laporan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bandar Lampung mencatatkan lebih dari 30 kasus korupsi besar dalam lima tahun terakhir, yang mencakup penyalahgunaan anggaran, gratifikasi, dan pengadaan barang dan jasa. (Sari Dewi, 2022, hlm. 50-55)

### **Kasus-Kasus Korupsi yang Menonjol**

Beberapa kasus korupsi yang mencolok di Bandar Lampung antara lain:

- Kasus Dinas Pekerjaan Umum (2021): Mantan kepala Dinas Pekerjaan Umum ditangkap oleh KPK karena terlibat dalam penyalahgunaan anggaran proyek

infrastruktur. Kerugian negara yang ditimbulkan diperkirakan mencapai Rp 10 miliar. Proyek-proyek ini meliputi pembangunan jalan dan jembatan yang seharusnya meningkatkan aksesibilitas masyarakat. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana pengawasan yang lemah dapat menyebabkan penyimpangan anggaran.

- Kasus Dinas Pendidikan (2021): Dalam pengadaan buku dan alat tulis, ditemukan praktik korupsi berupa mark-up harga yang merugikan anggaran daerah sekitar Rp 5 miliar. Kasus ini menunjukkan lemahnya pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa. Masyarakat harus dilibatkan dalam proses pengawasan untuk mencegah praktik korupsi semacam ini. (Setiawan Bagus, 2019, hlm. 30-45)
- Kasus Gratifikasi di Dinas Kesehatan (2020): Beberapa pejabat di Dinas Kesehatan terlibat dalam penerimaan gratifikasi dari kontraktor yang mengelola proyek kesehatan, dengan total nilai gratifikasi mencapai Rp 2 miliar. Kasus ini menyoroti perlunya sistem pelaporan yang lebih transparan, serta pelatihan bagi pejabat publik mengenai etika dan tanggung jawab mereka. (Zulkarnain, 2021, hlm. 22-35)

### **Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Daerah**

Korupsi memiliki dampak yang luas dan mendalam terhadap pembangunan daerah. Kerugian finansial akibat korupsi menghambat investasi publik dan mengurangi kualitas layanan publik. Dalam konteks Bandar Lampung, proyek-proyek infrastruktur yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sering kali terhambat atau gagal dilaksanakan dengan baik. Misalnya, proyek pembangunan jalan yang terhenti akibat penyimpangan anggaran dapat mengakibatkan kemacetan dan memperburuk kondisi transportasi di kota. (Wulandari Nanda, 2021, hlm. 45-60)

Lebih jauh lagi, korupsi menciptakan ketidakadilan sosial. Masyarakat yang paling terdampak adalah mereka yang berada di lapisan bawah, yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program-program pemerintah. Ketidakpuasan masyarakat, yang muncul akibat ketidakadilan ini, dapat mengakibatkan apatisisme politik, di mana warga tidak lagi merasa terlibat dalam proses pemerintahan. Hal ini menciptakan siklus yang sulit diputus, di mana rendahnya partisipasi masyarakat dapat memperburuk praktik korupsi.

### **Era Digitalisasi dan Peluang Pencegahan Korupsi**

Digitalisasi menawarkan alat baru untuk memerangi korupsi. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Beberapa inisiatif yang telah diterapkan di Bandar Lampung mencakup:

- Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA): Penggunaan SIMDA bertujuan untuk memudahkan pemantauan penggunaan anggaran secara real-time.

Sistem ini memungkinkan pejabat untuk melacak pengeluaran dan pendapatan daerah dengan lebih efisien. Namun, implementasi sistem ini masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan bagi pengguna dan minimnya pemahaman tentang teknologi. (Almasyah Riski, 2020, Hlm. 50-65.)

- Aplikasi Pelaporan Masyarakat: Beberapa aplikasi telah dikembangkan untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Salah satu contohnya adalah aplikasi "Lapor!" yang memungkinkan masyarakat untuk mengirimkan laporan secara langsung kepada KPK. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini masih rendah, terutama di kalangan masyarakat yang kurang teredukasi. (Damanhuri Asri, 2021, Hlm. 34-48)

### **Tantangan dalam Penerapan Teknologi**

Meskipun teknologi memiliki potensi untuk mengurangi korupsi, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi:

- Kurangnya Infrastruktur Teknologi: Beberapa daerah di Bandar Lampung masih memiliki keterbatasan dalam akses internet dan infrastruktur teknologi, yang menghambat penggunaan sistem digital. Hal ini mengakibatkan ketidakmerataan dalam pengelolaan anggaran, di mana daerah yang lebih maju secara teknologi dapat lebih efektif dalam pencegahan korupsi. (Hasanah Lestari, 2022, hlm. 30-36)
- Resistensi terhadap Perubahan: Budaya organisasi yang sudah mapan di instansi pemerintah sering kali menghadapi resistensi terhadap penerapan teknologi baru. Pejabat publik mungkin merasa terancam oleh transparansi yang dibawa oleh sistem digital. Oleh karena itu, penting untuk melakukan perubahan budaya organisasi yang mendukung transparansi dan akuntabilitas.
- Keamanan Data: Dengan meningkatnya penggunaan teknologi, risiko keamanan data juga meningkat. Perlindungan terhadap data sensitif harus menjadi prioritas untuk mencegah penyalahgunaan informasi. Sistem harus dirancang dengan mempertimbangkan aspek keamanan untuk melindungi data publik dari penyalahgunaan. (Iskandar Mahdi, 2019, hlm. 70-85)

### **Strategi Pemberantasan Korupsi**

Untuk mengatasi tantangan ini, beberapa strategi dapat diterapkan:

- Peningkatan Pendidikan dan Kesadaran Hukum: Program edukasi tentang korupsi dan hak-hak masyarakat perlu ditingkatkan. Melibatkan sekolah, universitas, dan organisasi masyarakat sipil dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum di kalangan warga.

Penyuluhan mengenai pentingnya pengawasan publik dalam pengelolaan anggaran harus menjadi fokus utama. (Putri, 2021, hlm. 15-29)

- **Pelatihan untuk Aparat Penegak Hukum:** Aparat penegak hukum perlu mendapatkan pelatihan terkait teknologi digital dan metode penyelidikan modern. Hal ini penting untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mendeteksi dan menangani praktik korupsi. Pelatihan juga harus mencakup etika dan nilai-nilai integritas untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum berkomitmen untuk memberantas korupsi.
- **Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan:** Masyarakat harus dilibatkan dalam pengawasan pengelolaan anggaran. Membangun saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat dapat membantu dalam pelaporan dugaan korupsi. Program-program yang mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan dapat meningkatkan akuntabilitas.

### **Kerangka Hukum dan Kebijakan**

Kerangka hukum yang kuat sangat penting untuk memberantas korupsi. Dalam konteks ini, perlu ada revisi dan pembaruan peraturan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- **Revisi Undang-Undang Pemberantasan Korupsi:** Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu direvisi untuk memperkuat sanksi terhadap pelaku korupsi. Selain itu, perlu ada ketentuan yang lebih jelas mengenai peran masyarakat dalam proses pemberantasan korupsi. (Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Wilsa Syahira, 2024, hlm. 5-10)
- **Penguatan Lembaga Pengawas Internal:** Lembaga pengawas internal di setiap instansi pemerintah harus diperkuat untuk memastikan bahwa pengelolaan anggaran dilakukan dengan transparan dan akuntabel. Pengawasan internal yang efektif dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.
- **Implementasi Sistem Pelaporan yang Efektif:** Sistem pelaporan yang memudahkan masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi harus diimplementasikan secara efektif. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu dalam mempercepat proses pelaporan dan tindak lanjut terhadap laporan Masyarakat. (Wahyuni Saputri, Zainudin Hasan, 2024, hlm. 7-10)

### **Kolaborasi antar Lembaga**

Pemberantasan korupsi memerlukan kolaborasi antara berbagai lembaga, baik pemerintah maupun non-pemerintah. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

- Kemitraan antara KPK dan Pemerintah Daerah: KPK perlu menjalin kemitraan yang lebih erat dengan pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan akuntabilitas. Program-program pelatihan dan workshop dapat diadakan untuk meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah. (Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan, 2022, hlm. 49-50)
- Keterlibatan Organisasi Masyarakat Sipil: Organisasi masyarakat sipil dapat berperan sebagai mitra dalam mengawasi pengelolaan anggaran. Mereka dapat melakukan pengawasan independen dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait praktik korupsi.
- Kerjasama Internasional: Mengingat korupsi adalah masalah global, kerjasama internasional sangat penting. Indonesia perlu aktif dalam forum-forum internasional yang membahas isu korupsi dan berbagi pengalaman serta praktik terbaik dengan negara lain.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini telah menganalisis upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Bandar Lampung dalam konteks digitalisasi. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan analisis yang dilakukan, beberapa poin penting dapat disimpulkan: Tingginya Kasus Korupsi: Korupsi di Bandar Lampung masih menjadi masalah serius, dengan banyak kasus yang melibatkan pejabat publik. Kasus-kasus yang telah terungkap menunjukkan bahwa penyalahgunaan anggaran dan praktik gratifikasi terus terjadi, menghambat pembangunan dan merugikan masyarakat. Dampak Negatif terhadap Pembangunan: Korupsi tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga mengganggu kualitas pelayanan publik dan menciptakan ketidakadilan sosial. Masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat dari program pemerintah sering kali menjadi korban dari praktik korupsi. Peluang melalui Digitalisasi: Era digitalisasi menawarkan berbagai peluang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Penggunaan teknologi informasi dapat membantu memantau penggunaan anggaran secara real-time dan melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan. Tantangan yang Dihadapi: Meskipun terdapat peluang, masih banyak tantangan yang harus diatasi, termasuk kurangnya infrastruktur teknologi, resistensi terhadap perubahan, dan masalah keamanan data. Upaya untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam sistem pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan hati-hati untuk memastikan efektivitasnya. Strategi Pemberantasan yang Diperlukan: Untuk mengatasi korupsi, diperlukan strategi yang komprehensif, termasuk

peningkatan pendidikan dan kesadaran hukum, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Selain itu, perlu adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat sipil, dan lembaga penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih transparan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alamsyah, R. 2020. *Membangun Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran*. Jurnal Kebijakan Publik, Vol. 7 No. 3, Hlm. 50-65.
- Aritonang, T. (2020). *Korupsi di Indonesia: Analisis dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Bambang Hartono, Zainudin Hasan, Wilsa Syahira. 2024. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dana Tunjangan Kinerja Kejaksaan Negeri Bandar Lampung*. Vol. 1. No. 12. Hlm. 5-10
- Damanhuri, A. 2021. *Korupsi dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jurnal Sosial dan Politik, Vol. 3 No. 2, Hlm. 34-48.
- Hasanah, L. 2022. *Inovasi Digital dalam Pengawasan Anggaran Daerah*. Jurnal Administrasi dan Manajemen, Vol. 5 No. 1, Hlm. 20-35.
- Iskandar M. 2019. *Analisis Kebijakan Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Jurnal Hukum dan Kebijakan, Vol. 2 No. 4, Hlm. 70-85.
- Lestari R. 2020. *Dampak Korupsi terhadap Pembangunan Daerah*. Jurnal Administrasi Publik, Vol. 2 No. 1, Hlm. 45-58.
- Nyimas Maharani Putri Pertiwi, Zainudin Hasan. 2022. *Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Justice Collaborator Terhadap Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*. Vol. 6. No. 1. Hlm. 49-50.
- Putri . 2021. *Peran Media dalam Meningkatkan Kesadaran Publik terhadap Korupsi*. Jurnal Komunikasi dan Media, Vol. 4 No. 2, Hlm. 15-29.
- Rahman A. 2021. *Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Era Digital*. Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 3. No. 3, Hlm. 67-79.
- Sari D. 2022. *Keterlibatan Masyarakat dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran di Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Setiawan B. 2019. *Strategi Pemberantasan Korupsi di Daerah: Studi Kasus Bandar Lampung*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 6 No. 1, Hlm. 30-45.
- Wahyuni Saputri, Zainudin Hasan. 2024. *Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan Anti Korupsi Sejak Dini Di Lembaga Pendidikan* . Vol.4 No. 6. Hlm. 7-10.
- Zulkarnain. 2021. *Persepsi Masyarakat terhadap Korupsi di Bandar Lampung*. Jurnal Masyarakat dan Pembangunan, Vol. 6 No. 1, Hlm. 22-35.